

IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APIP



Semester II
Tahun 2022



**INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No.127-133, Sekayu,
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50132

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Semester II Tahun 2022. Ikhtisar ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur selaku Pimpinan Daerah Provinsi, sebagaimana tertuang dalam piagam audit intern APIP Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2017.

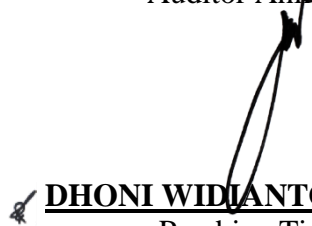
Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester II Tahun 2022 ini berisi kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Semester II Tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Ikhtisar ini disusun dengan harapan:

- a. Memberikan informasi perkembangan seluruh hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Memberikan informasi kegiatan pengawasan dan sebagai referensi dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan di masa mendatang dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintah yang baik.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2022 ini disusun, semoga bermanfaat.

Semarang, 27 Februari 2023

Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya


DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.¹²
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I - INFORMASI UMUM	1
A. Dasar Hukum	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Kebijakan Strategis	3
D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP	7
E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya	8
F. Kode Etik AAIP	10
BAB II - HASIL PENGAWASAN	12
A. Audit / Pengawasan	12
B. Reviu.....	21
C. Pemantauan.....	26
D. Evaluasi.....	26
E. Pengawasan Lainnya.....	28
BAB III - HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	38
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	38
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	39
BAB IV - HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....	42
A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	43
B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota.....	44
BAB V - SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	45
A. Simpulan	45
B. Hambatan.....	46
C. Rekomendasi.....	46
Lampiran 1 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK -RI.....	47
Lampiran 2 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	60
Lampiran 3 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjut Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 s.d. 2022.....	64
Lampiran 4 Rekapitulasi Hasil Pengaduan Masyarakat.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	7
Tabel 1.2.	Data Program Rencana Kerja dan Realisasi Berdasarkan PKPT Tahun 2022.....	10
Tabel 2.1	Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	13
Tabel 2.2	Rekomendasi Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	14
Tabel 2.3.	Realisasi Audit Kinerja Tahun 2022.....	15
Tabel 2.4.	Realisasi ADTT Tahun 2022	17
Tabel 2.5.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di SKPD Provinsi Jawa Tengah	27
Tabel 2.6.	Rincian Pelaporan Gratifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	29
Tabel 2.7.	Status Penetapan Objek Gratifikasi Berdasarkan Keputusan KPK Tahun 2022.....	30
Tabel 2.8.	Rekapitulasi Penanganan LHKPN	30
Tabel 2.9.	Rekapitulasi Penanganan LHKASN	31
Tabel 2.10.	Perbandingan Capaian MCP KORSUPGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 2021, dan 2022.....	33
Tabel 2.11.	Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ..	35
Tabel 2.12.	Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	36
Tabel 3.1.	Status Tindak Lanjut BPK RI Tahun 2005 s.d. 2022.....	39
Tabel 3.2.	Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumlah Temuan)	40
Tabel 3.3.	Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumlah Nilai).....	40
Tabel 3.4.	Status Tindak Lanjut Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.....	41
Tabel 4.1.	Pengaduan Masyarakat berdasarkan sumber aduan yang masuk pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	42
Tabel 4.2.	Pengaduan Masyarakat berdasarkan penanganannya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	43
Tabel 4.3.	Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan pada Kabupaten Kota.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016.....	3
Gambar 1.2. Sumber daya aparatur/kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	6
Gambar 2.1. Profil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2022.....	23
Gambar 2.2. Penerimaan Penghargaan Predikat A atas Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ..	24
Gambar 2.3. Grafik Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2018 s.d. 2021	27
Gambar 2.4. Grafik Pelaporan Gratifikasi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 s.d. 2022	29
Gambar 2.5. Total Capaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24)	31
Gambar 2.6. Perincian Capaian Penilaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24).....	32
Gambar 2.7. Nilai rata-rata 49 SKPD Provinsi Jawa Tengah hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi.....	37
Gambar 4.1. Pengaduan Masyarakat tahun 2022 berdasarkan klasifikasi jenis aduan	43

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022; dan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat melaksanakan fungsi :

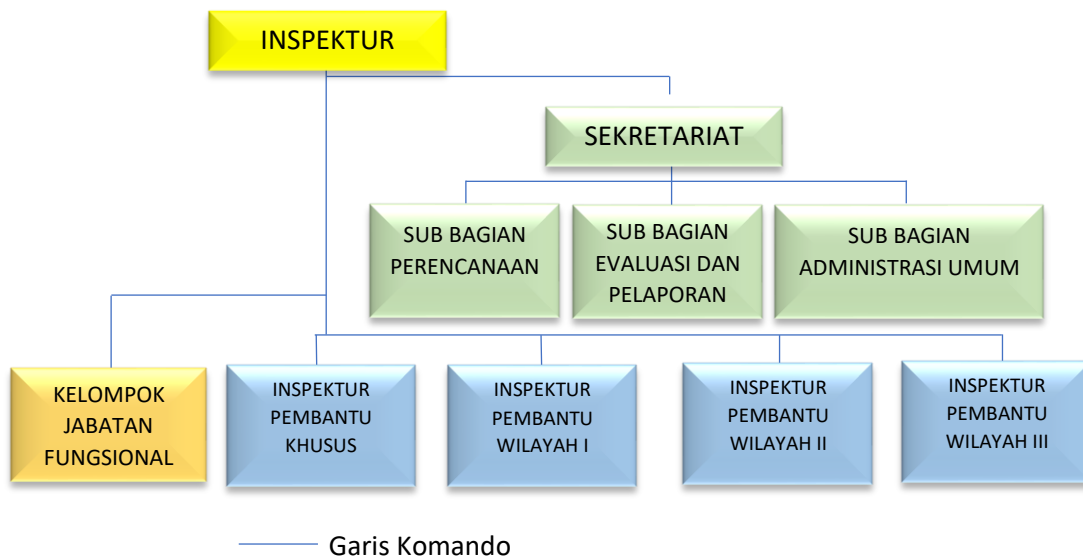
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| a. Plt. Inspektur | : Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si. |
| b. Sekretaris | : Nur Rohmat, S.Sos., M.Si. |
| 1) Sub Bagian Administrasi Umum | : Sri Rahayuningsih, S.E., MM. |
| 2) Sub Bagian Perencanaan | : Sodikun, S.E., M.SE., M.A. |

- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : Bagus Panuntun, S.STP., M.A.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I : Drs. Antonius Trihananto
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II : Soemarijono, S.E., M.Si.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III : Ratna Luhung T., S.E., MM.
- f. Plt. Inspektur Pembantu Khusus : A. Dwijo Putranto, S.E., Akt, M.Si.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- 1) Auditor;
 - 2) Auditor Kepegawaian; dan
 - 3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Gambar 1.1. Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016



C. Kebijakan Strategis

1. Eksternal

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan tagline “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi kedua yaitu: “Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota” merupakan komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang bebas dari korupsi. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden

dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sejalan dengan tujuan Gubernur Jawa Tengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ikut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut. Hal ini tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

2. Internal

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023 yaitu:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan beberapa strategi yang harus dilakukan. Adapun strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- b. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- c. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota;
- d. Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- g. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dibutuhkan kebijakan-kebijakan internal.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yaitu:

- a. Menjadi mitra Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yaitu:

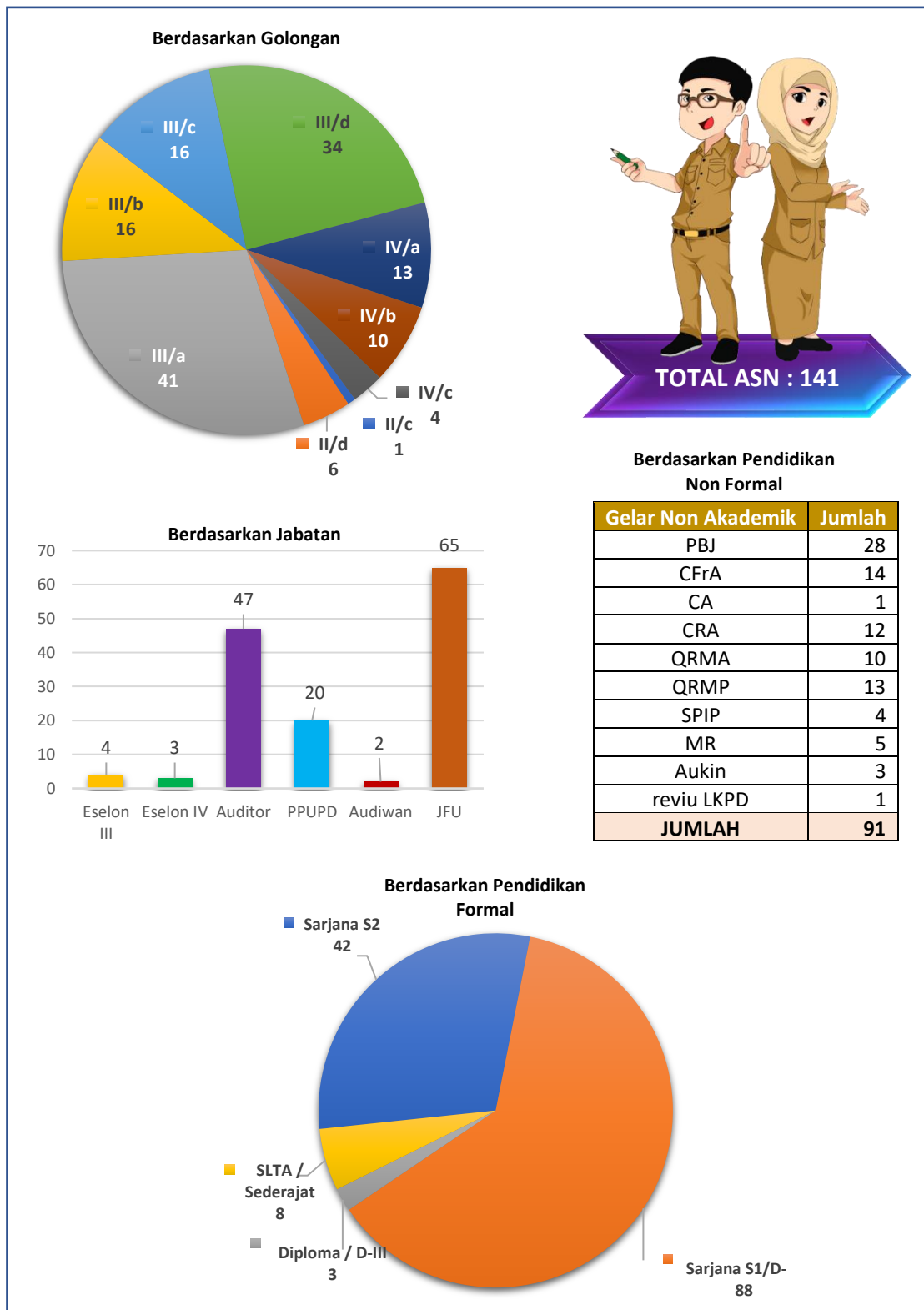
- a. Level Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran adalah Kapabilitas APIP Level 3 penuh pada elemen:
 - Peran dan Layanan (elemen 1);
 - Praktik Profesional (elemen 3); dan
 - Struktur Tata Kelola (elemen 6).
- b. Nilai Maturitas SPIP dengan indikator sasaran adalah Maturitas SPIP Nilai 3,19.

Guna mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam RPJMD perlu didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 169 sumber daya aparatur. Dari jumlah tersebut, tidak ada ASN di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan golongan/pangkat I, golongan/pangkat II/a dan II/b, serta golongan/pangkat IV/c dan IV/d. Golongan/pangkat ASN didominasi oleh golongan/pangkat III dengan tingkat pendidikan mayoritas adalah Sarjana S1/D-IV. Selengkapnyanya data ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Sumber daya aparatur/kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



b. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana yang dirincikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.539	13.273.433.774
	- Alat-Alat Besar	7	208.302.000
	- Alat-Alat Angkutan	34	4.782.892.291
	- Alat-Alat Bengkel dan alat ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.042	4.818.685.900
	- Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	64	940.908.165
	- Alat-Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	353	2.320.723.418
3.	Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu titik kontrol/pasti	1	14.310.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	210	23.412.900
	- Bahan Perpustakaan	209	21.412.900
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
JUMLAH		1.753	26.436.732.124

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester II Tahun 2022 ini sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;

3. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
4. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya

Kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Kegiatan pengawasan tersebut antara lain meliputi:

1. Audit Kinerja, pada :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. SMA/SMK/SLB Negeri;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Audit dengan Tujuan Tertentu, pada :
 - a. Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi;
 - b. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - c. Wajib Laport LHKPN;
 - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Desa;
 - e. Pelayanan Publik UPTD Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Audit Gender;
 - g. Sistem IT UKPBJ;
 - h. Probity Audit;
 - i. Kepatuhan UKPBJ;
 - j. Pengelolaan SDM;
 - k. Proses Perizinan dan Non Perizinan;
 - l. Bantuan Sosial;
 - m. Optimalisasi Aset; dan

- n. Belanja Hibah
3. Reviu, pada :
- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Dokumen Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - f. Standar Satuan Harga (SSH);
 - g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - h. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - j. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
 - k. Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Jawa Tengah.
4. Evaluasi, pada :
- a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
 - b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah; dan
 - c. Benturan Kepentingan.
5. Pemantauan pada limpahan Kasus Aduan Masyarakat ke Kabupaten/Kota;
6. Pengawasan lainnya yang terdiri dari:
- a. Fasilitasi, Pendampingan Pengisian, dan Verifikasi LHKPN dan LHKASN 2022 serta Persiapan LHKPN 2023 (Pengumpulan Data Wajib Laporan);
 - b. Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas;
 - c. Sosialisasi Saber Pungli;
 - d. Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH);
 - e. Konsultasi capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Monitoring Capaian Stranas PK;
 - g. Reviu Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko;
 - h. Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi;
 - i. Asistensi Pembangunan Zona Integritas;

- j. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota;
- k. Koordinasi Kapabilitas APIP; dan
- l. Pengawasan Capaian SPM.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No, 10 Tahun 2022, untuk rencana kegiatan PKPT tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Data Program Rencana Kerja dan Realisasi Berdasarkan PKPT Tahun 2022

No.	KEGIATAN	PKPT			
		Target		Realisasi	
		Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp.)	Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp.)
A	Audit	256	3.682.830.000,00	277	5.053.671.146,00
	- Audit Dengan Tujuan Tertentu	71	2.001.650.000,00	102	1.864.488.617,00
	- Audit Kinerja	80	1.260.330.000,00	72	2.363.914.334,00
	- Reviu	105	420.850.000,00	103	825.268.195,00
B	Evaluasi	56	132.910.000,00	42	492.840.648,00
C	Pemantauan	2	34.500.000,00	70	644.363.170,00
D	Pengawasan Lainnya	52	1.150.850.000,00	117	1.860.953.388,00
	TOTAL	366	5.001.090.000,00	506	8.051.828.352,00

F. Kode Etik AAPI

Pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang. Untuk itu upaya peningkatan profesionalisme auditor secara berkesinambungan menjadi penting guna mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah tersebut perlu ada wadah yang mewakili profesi auditor intern pemerintah secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat, kehormatan, moral dan integritas yang tinggi, mengembangkan dan melaksanakan telaah sejawat untuk menciptakan kepercayaan atas hasil kerja auditor intern pemerintah, dan menyediakan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi, serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, adalah instansi pemerintah yang berhak untuk mengemban tugas pengawasan intern yang meliputi: audit, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya, dalam rangka memberikan nilai tambah bagi efektivitas dan efisiensi organisasi, maka dengan adanya implementasi Kode Etik bagi para auditor yang merupakan subyek dari pengawasan tertentu tersebut, dipastikan akan membantu organisasi/instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good goverment*) sebagai bagian dari tugas nasional.

Dalam penerapan kode etik, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman secara khusus pada Kode Etik AAIP yang merupakan aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi auditor Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman umum ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kode etik di lingkungan APIP dengan melakukan sosialisasi pada seluruh auditor dan aktif melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik untuk memastikan bahwa kode etik telah ditegakkan sehingga menciptakan kepercayaan atas hasil kerja APIP.

BAB II HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah termasuk pemeriksaan kasus dan khusus, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

A. Audit / Pengawasan

1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Dalam melaksanakan audit/pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan. Pada tahun 2022 PKPT tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Pada Semester 2 akhir Tahun 2022 terdapat 377 LHP dengan 1.376 temuan 1.871 rekomendasi dengan nilai Rp. 2.934.084.076,12 dengan rincian temuan sesuai dengan tabel berikut 2.1.

Tabel 2.1 dibawah menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari total temuan dapat dilihat bahwa temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 55,16% dan temuan 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien) sebesar 11,34%. Temuan-temuan tersebut dapat menunjukkan perbaikan apa yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dan menekan terjadinya temuan pada tahun selanjutnya.

Tabel 2.1 Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kelompok / Sub / Jenis Temuan	Kode	Temuan Hasil Pemeriksaan		
			Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	01			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	01.01	187	13,59%	2.210.053.211,67
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara	01.02	4	0,29%	4.955.000,00
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	01.03	15	1,09%	719.075.864,45
4	Administrasi	01.04	254	18,46%	0
5	Indikasi tindak pidana	01.05	1	0,07%	0
<i>Subtotal Kejadian</i>			461	33,50%	2.934.084.076,12
	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	02			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	02.01	158	11,48%	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	02.02	232	16,86%	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	02.03	369	26,82%	0
<i>Subtotal Kejadian</i>			759	55,16%	0
	Temuan 3E	03			
1	Ketidakhematan/pemborosan/keti dakekonomisan	03.01	16	1,16%	0
2	Ketidakefisienan	03.02	3	0,22%	0
3	Ketidakefektifan	03.03	137	9,96%	0
<i>Subtotal Kejadian</i>			156	11,34%	0
TOTAL			1.376	100%	2.934.084.076,12

Persentase terbanyak temuan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, sehingga fungsi pembinaan pengendalian internal dan penekanan terhadap peraturan penting dan wajib dilakukan.

Tabel 2.2 Rekomendasi Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	173	9,25%	2.252.935.800,16
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	2	0,11%	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	63	3,37%	244.562.725,96
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	3	0,16%	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	423	22,61%	407.306.250,00
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	280	14,97%	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	19	1,02%	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	8	0,43%	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	698	37,31%	29.279.300,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	58	3,10%	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	21	1,12%	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0,00%	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	123	6,57%	0
TOTAL		1.871	100%	2.934.084.076,12

Terhadap 1.376 temuan di atas, Inspektorat telah memberikan 1.871 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjutnya. Rekomendasi dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalkan akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Secara garis besar pada Tahun 2022, Inspektorat merekomendasikan 3 hal utama dalam proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yaitu :

1. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan (37,31%)
2. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian (22,61%)
3. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi (14,97%)

Tabel 2.3. Realisasi Audit Kinerja Tahun 2022

No.	Kegiatan	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah Objek	Jumlah Objek
1	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	7	7
2	Audit Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah	1	0
3	Audit Kinerja SKPD Provinsi	18	6
4	Audit Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri	18	25
5	Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Kerjasama Daerah	16	16
6	Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Trantibumlinmas – Urusan Pendidikan	20	18
Grand Total		80	72

Audit Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- a. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Kerja Sama Daerah
Inspektorat melaksanakan kegiatan Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah Aspek Kerja Sama Daerah sampling pada 16 Kabupaten/Kota di Tahun 2022, yaitu:
 - 1) Kabupaten Sukoharjo
 - 2) Kabupaten Karanganyar
 - 3) Kabupaten Wonogiri
 - 4) Kota Surakarta
 - 5) Kabupaten Boyolali
 - 6) Kabupaten Klaten
 - 7) Kabupaten Demak
 - 8) Kabupaten Kebumen
 - 9) Kabupaten Kudus
 - 10) Kabupaten Temanggung
 - 11) Kabupaten Magelang
 - 12) Kabupaten Wonosobo
 - 13) Kabupaten Sragen
 - 14) Kabupaten Grobogan
 - 15) Kabupaten Kendal
 - 16) Kota Magelang
- b. Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Trantibumlinmas – Urusan Pendidikan

Inspektorat melaksanakan kegiatan Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Trantibumlinmas – Urusan Pendidikan sampling pada 18 Kabupaten/Kota di Tahun 2022, yaitu:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) Kabupaten Banjarnegara | 10) Kabupaten Purworejo |
| 2) Kabupaten Banyumas | 11) Kabupaten Rembang |
| 3) Kabupaten Blora | 12) Kabupaten Sukoharjo |
| 4) Kabupaten Brebes | 13) Kabupaten Wonogiri |
| 5) Kabupaten Karanganyar | 14) Kabupaten Wonosobo |
| 6) Kabupaten Magelang | 15) Kota Magelang |
| 7) Kabupaten Pekalongan | 16) Kota Pekalongan |
| 8) Kabupaten Pemasang | 17) Kota Salatiga |
| 9) Kabupaten Purbalingga | 18) Kota Surakarta |

c. Audit Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri

Inspektorat melaksanakan kegiatan Audit Kinerja SMA/SMK/SLB sampling pada 25 Sekolah SMA/SMK yang tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2022, yaitu:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) SMAN 1 Jogonalan Klaten | 14) SMAN 1 Toroh Grobogan |
| 2) SMAN 1 Jatinom Klaten | 15) SMAN 1 Wirosari Grobogan |
| 3) SMAN 1 Karangnom Klaten | 16) SMAN 1 Geyer Grobogan |
| 4) SMAN 1 Ceper Klaten | 17) SMAN 3 Rembang |
| 5) SMKN 1 Trucuk Klaten | 18) SMKN 1 Sedan Rembang |
| 6) SMKN 1 Jumantono Karanganyar | 19) SMAN 1 Wonosobo |
| 7) SMAN Colomadu Karanganyar | 20) SMKN 2 Wonosobo |
| 8) SMKN Jenawi Karanganyar | 21) SMAN 1 Kedungwuni Pekalongan |
| 9) SMKN Ngargoyoso Karanganyar | 22) SMKN 1 Kedungwuni Pekalongan |
| 10) SMKN 1 Jogonalan Klaten | 23) SMAN 1 Kebumen |
| 11) SMAN Jumapolo Karanganyar | 24) SMKN 1 Kebumen |
| 12) SMKN Jatipuro Karanganyar | 25) SMAN 1 Muntilan |
| 13) SMAN 1 Pulokulon Grobogan | |

d. Audit Kinerja SKPD Provinsi

Audit Kinerja dilakukan pada beberapa SKPD dengan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah. Ada 6 Kegiatan di tahun 2022 ini dengan obyek pemeriksaan yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan sebanyak 2 kali
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah KELET
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
- 5) Rumah Sakit Jiwa Daerah SURAKARTA

e. Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Audit Akhir Masa Jabatan untuk Bupati/Walikota pada Tahun 2022 sebanyak 7 kali. yaitu:

- 1) Kabupaten Batang
- 2) Kota Salatiga
- 3) Kabupaten Jepara
- 4) Kabupaten Banjarnegara
- 5) Kabupaten Pati
- 6) Kabupaten Cilacap
- 7) Kabupaten Brebes

2. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit kinerja.

Tabel 2.4. Realisasi ADTT Tahun 2022

No.	KEGIATAN	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp.)
1	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	3	3
2	Audit Bantuan Sosial	2	2
3	Audit Belanja Hibah	7	3
4	Audit Khusus/Kasus/ Aduan Masyarakat/ Investigasi	24	30
5	Audit Pelayanan Publik UPTD Provinsi/RSUD	8	8
6	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	1	1
7	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	6	10
8	Audit Kepatuhan	1	31
9	Probity Audit	12	11
JUMLAH		64	99

Adapun Rincian dari Audit dengan Tujuan Tertentu tersebut antara lain :

a. Audit Belanja Hibah Ternak

Adapun untuk Audit Belanja Hibah ternak dilaksanakan tiga kali, yaitu pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juli, Dinas Pertanian dan Perkebunan pada bulan Agustus, dan Biro Kesejahteraan Rakyat pada Bulan Agustus.

b. Audit Bantuan Sosial

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Audit Bantuan Sosial pada Bulan Agustus dan Oktober yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

c. Audit Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa

Audit Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa dilakukan di awal Tahun 2022 yaitu antara bulan Februari hingga Mei sebanyak 10 kali yaitu diantaranya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Kabupaten Wonosobo | 6) Kabupaten Klaten |
| 2) Kabupaten Wonogiri | 7) Kabupaten Grobogan |
| 3) Kabupaten Jepara | 8) Kabupaten Batang |
| 4) Kabupaten Semarang | 9) Kabupaten Boyolali |
| 5) Kabupaten Karanganyar | 10) Kabupaten Sragen |

d. Audit Bantuan Keuangan Gubernur

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Audit Bantuan Keuangan Gubernur sebanyak tiga kali yaitu pada Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Jepara pada Bulan Januari 2022.

e. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE dilaksanakan pada bulan Desember pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

f. Probit Audit

Probit Audit dilaksanakan sebanyak Sebelas kali yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebanyak empat kali, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebanyak empat kali, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo.

g. Audit Kepatuhan

Inspektorat melaksanakan audit kepatuhan sebanyak tiga puluh kali terhadap SKPD ada 19 kegiatan, dan SMA/SMK/SLB Negeri sebanyak 12 kegiatan :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Sosial
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- 9) Dinas Perhubungan
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 12) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
- 13) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 15) Dinas Ketahanan Pangan
- 16) Dinas Pekerjaan umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
- 17) Biro Umum Setda
- 18) Biro Perekonomian Setda
- 19) Sekretariat DPRD
- 20) SMAN 1 Karangtengah Kabupaten Demak
- 21) SMKN 1 Sayung Kabupaten Demak
- 22) SMKN 1 Klaten
- 23) SMAN 1 Klaten
- 24) SMAN 2 Bae Kudus
- 25) SMAN 1 Bandongan Kab. Magelang
- 26) SMAN 1 Pati
- 27) SMAN 4 Pati
- 28) SMAN 2 Pemalang
- 29) SMAN 3 Pemalang
- 30) SMAN 5 Magelang
- 31) SMAN 5 Tegal

h. Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan audit dengan tujuan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat sebanyak tiga puluh kali. Obyek pemeriksaan ada yang dari SMK/SMA Negeri, dan ada yang dari SKPD diantaranya :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) SMK di Kabupaten Banyumas | 14) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO |
| 2) SMAN di Purworejo | 15) Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. AMINO GONDO HUTOMO |
| 3) SMKN di Kab Banjarnegara | 16) Rumah Sakit Umum Daerah MOEWARDI |
| 4) SMA di Jepara | 17) Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| 5) SMK di Kendal | 18) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| 6) Kabupaten Tegal (dua kali) | 19) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO |
| 7) Kabupaten Pati (lima kali) | 20) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| 8) Kabupaten Brebes (dua kali) | 21) Dinas Sosial |
| 9) Kabupaten Klaten (empat kali) | |
| 10) Kabupaten Grobogan | |
| 11) Kota Salatiga | |
| 12) Kabupaten Pemasang | |
| 13) Kabupaten Purbalingga | |

i. Audit Pelayanan Publik

Audit Pelayanan Publik di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak delapan kali yaitu pada Bulan Mei dan Bulan Juli :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) UPPD Bappenda Kota Salatiga | 5) UPPD Bappenda Kabupaten Pekalongan |
| 2) UPPD Bappenda Kabupaten Boyolali | 6) UPPD Bappenda Kabupaten Tegal |
| 3) UPPD Bappenda Kabupaten Semarang | 7) UPPD Bappenda Kabupaten Brebes |
| 4) UPPD Bappenda Kabupaten Demak | 8) Pengawasan Perijinan pada DPMPTSP |

B. Reviu

Dalam menjalankan perannya, APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari yang sebelumnya *watch dog* (sekedar mencari-cari kesalahan) menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat pencegahan (*preventive*), konsultasi (*consultative*), dan pemberian keyakinan (*quality assurance*), pada program-program strategis, yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning system*, pendampingan, dan pembinaan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah seyogyanya mampu mengawal dalam mencapai nilai, tujuan, dan sasaran utama melalui proses *quality assurance* dan mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga dapat menghasilkan long-term values bagi organisasi pada area tata kelola, risiko, dan pengendalian dengan sudut pandang *oversight*, *insight*, dan *foresight*, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai-nilai yang bersifat prosedural. Dalam melaksanakan peran APIP tersebut salah satunya yaitu melalui kegiatan reviu. Reviu merupakan penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 11 (sepuluh) reviu selama tahun 2022, yaitu:

1. Reviu Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Pengendalian Inflasi

Pelaksanaan Reviu Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dengan Monitoring Penyaluran Bantuan BBM Subsidi untuk nelayan dalam rangka penanggulangan dampak Inflasi. Reviu dilakukan sampling di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati antara bulan November s.d. Desember.

2. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Murni dan RKA Perubahan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu RKA perubahan Tahun Anggaran 2022 sampling pada 5 SKPD yaitu : Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Sekretariat DPRD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara bulan September dan Oktober.

Untuk pelaksanaan Reviu RKA murni Tahun 2023 pada 3 SKPD antara lain Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Jiwa Daerah SURAKARTA, dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan November sampai dengan Desember.

3. Reviu Standart Satuan Harga.

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standart Harga Satuan (SSH) merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Sedangkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.

Penetapan biaya standar dimaksudkan sebagai upaya preventif menekan penyalahgunaan anggaran. Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah kegiatan di Tahun 2022 ini dilakukan pada bulan Agustus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

4. Reviu Tata Kelola Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Inspektorat melakukan Reviu ini pada bulan Agustus 2022 pada Biro Administrasi Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), ditegaskan bahwa data dan dokumen pendukung LPPD sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan reviu atas LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu terhadap LPPD Provinsi Jawa Tengah sebelum ditandatangani Gubernur.

6. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 pada tanggal 1 s.d. 7 Maret 2022 pada Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama. Adapula kegiatan Bimtek Penyusunan LPPD TA 2022 dalam rangka meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kab. Karanganyar pada tanggal 2 s.d. 3 November 2022 diundang sebagai Narasumber.

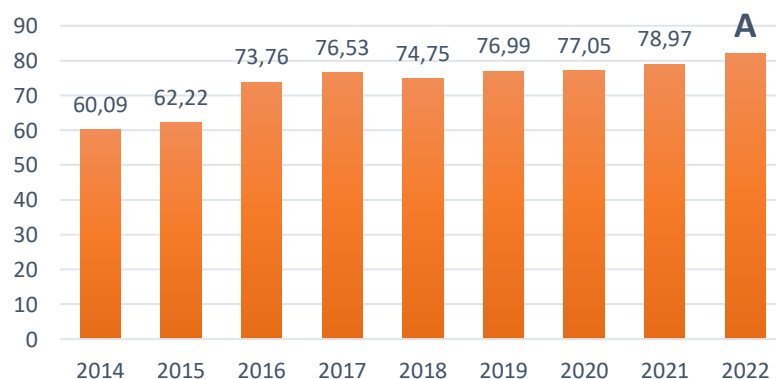
7. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Reviu RKPD beberapa kegiatan terkait RKPD pada tahun 2022 yaitu pada tanggal 12 s.d. 13 Mei 2022 dengan acara fasilitasi RKPD untuk Kabupaten/Kota pada tanggal 27 Mei, 2 s.d. 7 Juni 2022, serta melaksanakan fasilitasi pencermatan Rancangan Perkada Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 tanggal 27 s.d. 28 Juli 2022 dan fasilitasi Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada bulan Agustus di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

8. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu PMPRB pada seluruh perangkat daerah (49 SKPD) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi telah disajikan dengan data dukung yang akurat, andal, dan valid. Nantinya, pelaksanaan reformasi birokrasi ini akan dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB dan menghasilkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Gambar 2.1 Profil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2022



Berdasarkan surat dari MENPAN RB Republik Indonesia Nomor B/91/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022, hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah 78,97 dan untuk 2022 ini pada Bulan Desember 2022, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima penghargaan atas Predikat A pada indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.2 Penerimaan Penghargaan Predikat A atas Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



9. Reviu Stock Vaksin

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Reviu Selisih Stok Vaksin hasil pemeriksaan fisik persediaan Tim BPK dan selisih distribusi

Vaksin Sinovac sebanyak 800 dosis. Reviu ini telah selesai dilaksanakan pada 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 094/90/TU/2022.

10. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik

Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2022 di bidang irigasi, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bidang pariwisata, bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta bidang kelautan dan perikanan yang selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Reviu dilakukan di 8 (tujuh) Perangkat Daerah, yaitu:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;

- 2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
- 3) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Dinas Kesehatan; dan
- 8) Dinas Kelautan dan Perikanan.

11. Reviu Manajemen ASN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Manajemen ASN berupa Reviu Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Reviu ini selesai dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022.

12. Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah pada 2 SKPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah selesai dilaksanakan pada 21 April 2022 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah selesai dilaksanakan pada 28 April 2022.

13. Reviu Tata Kelola Perizinan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah pada 19 April 2022.

14. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 22 April 2022.

15. Reviu terkait Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pengendalian Inflasi

Riviu ini dilakukan pada awal bulan November 2022 pada 6 SKPD yaitu:

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan,
- b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,
- c) Dinas Kesehatan Hewan,
- d) Dinas Perhubungan,

e) Dinas Ketahanan Pangan

Wujud dari Belanja Tak Terduga dalam pengendalian inflasi ini berupa bantuan Bahan Bakar Minyak maupun tunai untuk Masyarakat terdampak baik itu dari kelompok Nelayan, maupun pelaku usaha pariwisata, peternakan, perhubungan dan pangan.

Pada akhir bulan November 2022, dilakukan kembali Monitoring dan Evaluasi BTT pengendalian inflasi untuk 3 SKPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Ketahanan Pangan.

C. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan pemantauan atas limpahan kasus aduan masyarakat ke Kabupaten/Kota. Hasil pemantauan TLHP dan limpahan kasus aduan masyarakat ke Kab/Kota lebih rinci dijelaskan pada BAB III dan BAB IV.

D. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah :

1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan rencana pelaksanaan pada bulan Juli 2022.

2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah

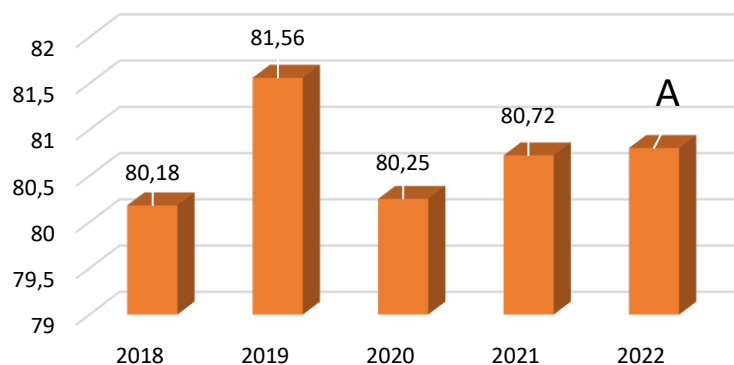
Dalam Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB untuk SAKIP Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 80,25 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah baik.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam Evaluasi SAKIP, memeriksa 41 SKPD di Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Agustus dengan rincian nilai SAKIP SKPD Provinsi Jawa Tengah masih-masing dapat dilihat di tabel 2.5.

Tabel 2.5. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di SKPD Provinsi Jawa Tengah

No.	SKDP	NILAI SAKIP 2022	No.	SKDP	NILAI SAKIP 2022
1	RSUD MOEWARDI	89,91	22	DINTANBUN	81,37
2	RSUD MRGN	89,72	23	DIPERMADES	81,32
3	DISHANPAN	89,64	24	RSJD AMINO	81,09
4	DINKES	87,42	25	BAPPEDA	81,02
5	DINAS P3AKB	86,99	26	SET DPRD	80,40
6	DINAS ARPUS	86,70	27	DISNAKERTRANS	80,12
7	RSUD KELET	85,18	28	BAPENDA	79,83
8	INSPEKTORAT	85,13	29	DINAS SOSIAL	79,63
9	RSUD TUGUREJO	85,12	30	BPKAD	79,41
10	DINLUTKAN	83,44	31	DINKOP UKM	79,36
11	BPSDMD	83,30	32	BKD	79,17
12	DINAS LHHUT	83,24	33	DINAS PERKIM	79,08
13	DISNAKKESWAN	83,22	34	BADAN PENGHUBUNG	78,56
14	RSJD SOEJARWADI	83,16	35	DINAS PERHUBUNGAN	78,18
15	RSJD SURAKARTA	83,16	36	SETDA	77,18
16	DINAS PUBMCK	83,04	37	SATPOL PP	77,14
17	DINAS ESDM	82,97	38	DISDIK	77,04
18	DINAS PUSDATARU	82,91	39	BAKESBANGPOL	76,77
19	DISPERINDAG	82,80	40	SET BPBD	76,22
20	DPMPTSP	82,01	41	DISPORAPAR	76,22
21	DISKOMINFO	81,47			

Gambar 2.3. Grafik Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2018 s.d. 2022



Pada Bulan yang sama yaitu bulan Agustus evaluasi SAKIP Tahun 2022 dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah di tahun-tahun sebelumnya

dapat dilihat pada Gambar 2.3. Untuk Nilai di tahun 2022, sampai dengan saat laporan ini dibuat, nilai yang sudah dirilis hanya kategori saja yaitu A (80 s.d. 90).

3. Evaluasi Benturan Kepentingan

Evaluasi benturan kepentingan dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas dengan guna mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam hal evaluasi benturan kepentingan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan mengevaluasi implementasi penanganan benturan kepentingan di SKPD Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi benturan kepentingan dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas dengan guna mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, memberikan pelayanan publik yang baik dan

Pada tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penghimpunan data *self assessment* identifikasi benturan kepentingan tiap semester dari setiap SKPD sehingga diharapkan dari Laporan tersebut SKPD dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

E. Pengawasan Lainnya

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Secara spesifik, Inspektorat mengemban tugas yang sudah ditentukan dalam Pengendalian Gratifikasi, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), Reviu Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko, pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota, serta Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

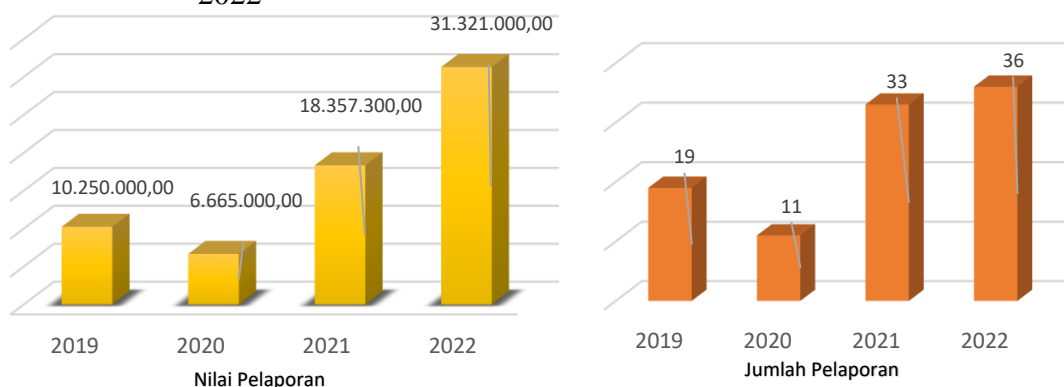
1. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi di Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 (yang merupakan pembaruan dari Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui peraturan Gubernur tersebut, telah dibentuk Subadmin Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah selain Inspektorat dan BUMD dengan harapan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengendalian gratifikasi di Jawa Tengah berkedudukan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi. Berdasarkan rencana kerja penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 beberapa kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada CPNS baru, Perangkat Daerah, dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penyampaian informasi gratifikasi melalui media sosial.

Gambar 2.4. Grafik Pelaporan Gratifikasi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 s.d. 2022



Tabel 2.6. Rincian Pelaporan Gratifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Nominal
1	Inspektorat	24	5.851.000,00
2	RSJD Surakarta	2	550.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	18.190.000,00
4	RSUD Tugurejo	1	1.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	680.000,00
6	DPMPSTP	1	150.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1.500.000,00
8	PT. BPR BKK Jawa Tengah	5	3.400.000,00
JUMLAH		36	31.321.000,00

Tabel 2.7. Status Penetapan Objek Gratifikasi Berdasarkan Keputusan KPK Tahun 2022

No.	Status Objek Gratifikasi	Jumlah Nilai
1	Disumbangkan sebagai bantuan sosial	6.620.000,00
2	Milik Negara	5.366.000,00
3	Milik Penerima	410.000,00
4	Dikelola Instansi	18.475.000,00
5	Dalam Proses Penetapan	150.000,00
Jumlah		31.021.000,00

Pada Tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan gratifikasi sebanyak 36 laporan dengan nilai Rp. 31.021.000,00 dimana Status Objek Gratifikasi sudah diproses oleh KPK sebanyak Rp. 30.871.000,00 dan sudah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan Tabel 2.7.

2. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Inspektorat telah melakukan fasilitasi LHKPN pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2022 untuk pelaporan LHKPN tahun 2021. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 700/10 tanggal 7 Juli 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD wajib untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural dan seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah untuk melaporkan LHKPN. Pada tahun 2021 jumlah Wajib Lapor yang sudah melaporkan sebanyak 2.283 orang dari 2.283 orang (100%).

Adapun pengelolaan LHKPN selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Rekapitulasi Penanganan LHKPN

Tahun	Jumlah Wajib LHKPN	Sudah Lapor	Belum Lapor
2018	2.392	2.392 (100%)	0
2019	2.419	2.419 (100%)	0
2020	2.320	2.320 (100%)	0
2021	2.283	2.283 (100%)	0

Sementara untuk jumlah Wajib LHKASN per 31 Desember 2022 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 36.281 (100%) dari 36.281 Wajib LHKASN.

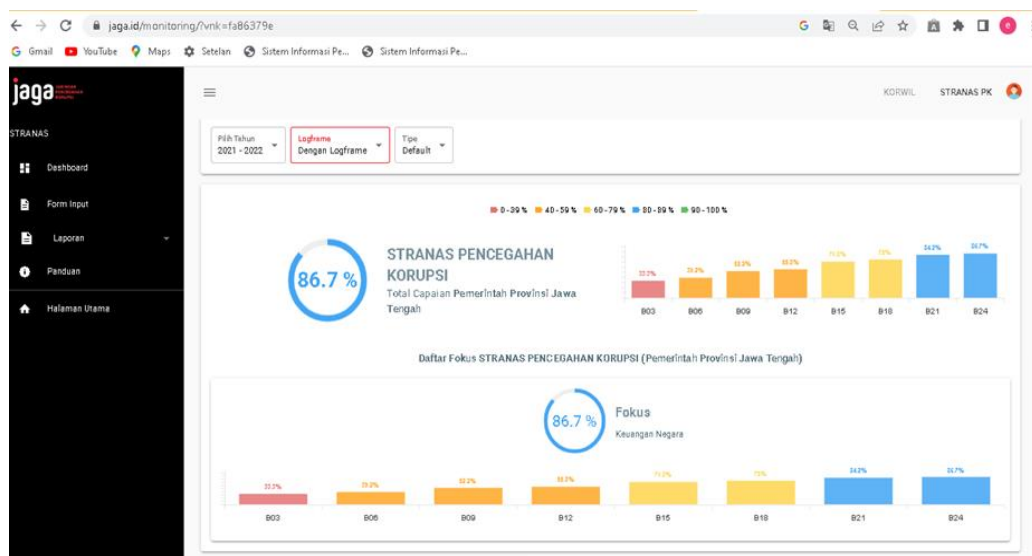
Tabel 2.9. Rekapitulasi Penanganan LHKASN

Tahun	Jumlah Wajib LHASN	Sudah Lapor	Belum Lapor
2021	38.198	38.198 (100%)	0 (0%)
2022	36.281	36.281 (100%)	0

3. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sedangkan tujuan Stranas PK adalah:

- Memberikan arahan tentang upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur.
- Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Gambar 2.5. Total Capaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24)

Stranas PK pelaporan tahun 2021-2022. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan data dukung dan melakukan pelaporan dalam aplikasi Stranas PK (jaga.id), yang terdiri dari: 1 (satu) fokus yaitu keuangan negara

serta 2 (dua) aksi yaitu integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik dan implementasi e-payment dan e-katalog. Sejumlah 2 (dua) aksi Stranas PK tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dipenuhi data dukungnya secara rutin setiap triwulan sampai dengan periode terakhir yaitu Triwulan VIII (B12) pada bulan Desember tahun 2022. Total capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penilaian terakhir yaitu periode Triwulan VIII (B24) sebesar 86,7 % (delapan puluh enam koma tujuh persen). Aksi Stranas PK tersebut sesuai tupoksinya berada pada 4 Perangkat Daerah yaitu:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.6. Perincian Capaian Penilaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24)

No	Indikator	Instansi	Fokus	Aksi	Output	Telapor	Terverifikasi	Nilai Verifikasi
6	Total Indikator					6 / 0	6 / 0	4
						Telapor / Belum lapor	Terverifikasi / Belum diverifikasi	Total Selesai
1.	Pembelitan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Pemanfaatan e-katalog	0	100	100
2.	Keseluruhan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran pembusukan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	0	70	70
3.	Keseluruhan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	0	50	50
4.	10% pengadaan barang dibawah 50jt dibelikan melalui bea pengadaan dan dibayar dengan KPPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Terwujudnya Bea Pengadaan di 10 K/L dan 24 Provinsi	0	100	100
5.	Merka logfama berirumusan: Aksi PK Output, Indikator, Baseline, Key Activity dan K/L/D penanggung jawab E-Payment dan E-Katalog	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Tersedianya merka logfama Aksi PK E-Payment dan E-Katalog	0	100	100
6.	Merka logfama berirumusan: Aksi PK Output, Indikator, Baseline, Key Activity dan K/L/D penanggung jawab Perencanaan Penganggaran	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Tersedianya merka logfama Aksi PK Perencanaan Penganggaran	0	100	100

4. Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan melakukan penilaian pada 7 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan

barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi. Adapun capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah **94,81** dan termasuk dalam peringkat 7 Nasional. Rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Perbandingan Capaian MCP KORSUPGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 2021, dan 2022

No.	Area Intervensi	2020	2021	2022
1	Perencanaan & Penganggaran APBD	100	92	91,25
2	Pengadaan Barang dan Jasa	90,7	97,8	99,1
3	Perizinan	95	97,4	100
4	Pengawasan APIP	96,9	95,9	91,4
5	Manajemen ASN	97,4	99,5	100
6	Optimalisasi Pajak Daerah	59,9	85,9	87,74
7	Manajemen Aset Daerah	91,6	91,9	93,73
Total		89,90	94,50	94,81

5. Reviu Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Reviu RTP tahun 2022 dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) dengan tujuan melakukan perbaikan penyusunan dokumen RTP pada OPD di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) serta menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan nilai Level Maturitas SPIP Provinsi Jawa Tengah. Reviu RTP telah dilaksanakan di 49 (empat puluh sembilan) OPD Provinsi Jawa Tengah pada Juni 2022 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/29/S.2/2022.

6. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas secara serentak dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Mei 2014 yang disaksikan Menteri PAN dan RB-RI, Ketua Ombudsman RI dan Perwakilan KPK-RI. Langkah selanjutnya telah dilakukan penilaian pada beberapa OPD/Unit Kerja. Pada tahun 2018 tidak ada OPD yang memenuhi kriteria dalam hal survei kepuasan masyarakat yang merupakan indikator dalam pengusulan OPD berpredikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) OPD yang memperoleh predikat WBBM yaitu RSUD Dr. Margono Soekarjo. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) OPD yang memperoleh predikat dari Kemenpan dan RB, 2 (dua) predikat WBBM yaitu RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Tugurejo serta 2 (dua) predikat WBK yaitu DPMPTSP dan DLHK Wilayah I. Sementara itu perolehan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021 telah diraih oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah/Unit yaitu Balatkop (Balai Pelatihan Koperasi dan UKM) Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) Surakarta.

Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan tahap penilaian internal untuk menilai OPD yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM dengan rincian:

a. Usulan WBBM untuk :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- 2) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten

b. Usulan WBK untuk :

- 1) Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM)
- 2) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan untuk hasilnya ternyata ke 4 OPD yang belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan kenaikan tingkat sesuai dengan usulannya.

7. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 094/234/TU/2022 tanggal 25 Mei 2022 pada 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dari 27 Mei 2022 hingga 7 Juni 2022 bertempat di 3 (tiga) lokasi berbeda yaitu Cabang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VII, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, dan BPTPHP Salatiga Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bulan Agustus dilakukan juga Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

8. Telaah Sejawat Ekstern

Telaah Sejawat Ekstern, pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/399/TU/2021 tanggal 25 November 2021. Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (conformance) praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar adalah 79,31%, dengan katagori penilaian “cukup”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut: (1) Standar Atribut mendapat 91% dan (2) Standar Pelaksana mendapat 68%.

Tabel 2.11. Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Penilaian	Nilai
Standar Atribut	81,01%
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	5,00%
Independensi dan Objektivitas	0,00%
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	2,33%
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	6,75%
Standar Pelaksanaan	74,12%
Mengelola Kegiatan Audit Intern	4,74%
Sifat Dasar Pekerjaan	0,00%
Perencanaan Penugasan	5,00%
Pelaksanaan Penugasan	1,50%
Komunikasi Hasil Penugasan	0,16%
Pemantauan Tindak Lanjut	3,33%
Total Nilai	77,56

Selain melakukan telaah sejawat ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, penelaahan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sendiri dilakukan oleh

Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai **77,56** dengan kategori “**Cukup**”. Rincian Penilaiannya dapat dilihat di Tabel 2.11.

9. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor PE.09.03/LHP-768/PW11/6/2022 tanggal 30 November 2022, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berada pada “Level 3” dengan skor 3,000. Capaian ini sekaligus telah menjawab target kapabilitas APIP tahun 2022 yang termuat dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian capaian kapabilitas APIP terdiri dari 6 (enam) elemen sebagai berikut:

Tabel 2.12. Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

10. Monitoring Evaluasi Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kab/Kota

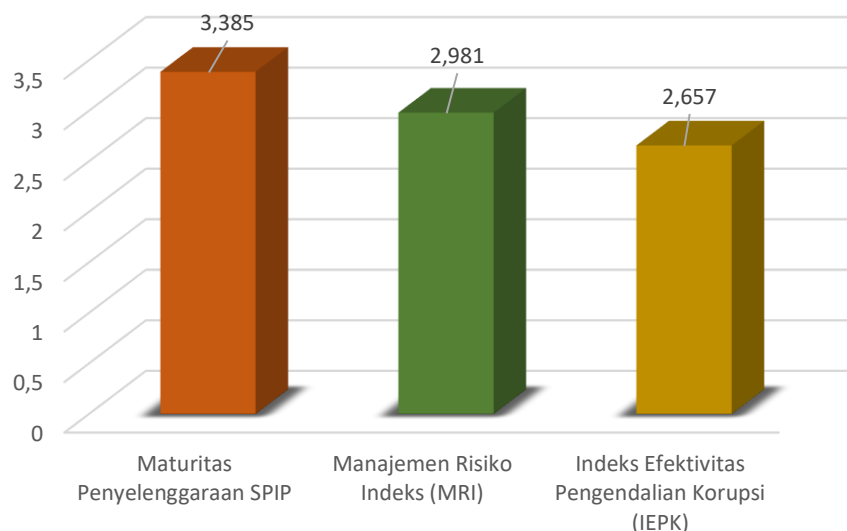
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 35 kegiatan pada 35 Kab/Kota pada bulan September dan Oktober 2022

11. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

Pelaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sebanyak 49 kegiatan pada 49 SKPD pada bulan September dan Oktober 2022 dengan surat tugas nomor 094/122/S.2/2022, 094/123/S.2/2022, 094/129/S.2/2022, dan 094/130/S.2/2022.

Penilaian rata-rata Penjaminan Kualitas dari 49 SKPD di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah ini.

Gambar 2.7. Nilai rata-rata 49 SKPD Provinsi Jawa Tengah hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi



Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki rekomendasi yang hampir sama pada tiap SKPD yaitu:

- a) Memperbaiki Kertas Kerja Penilaian Mandiri
- b) Meningkatkan kompetensi SDM dengan menjadwalkan diklat/ bimbingan teknis terkait manajemen risiko khususnya bagi UPR dan Tim Satgas SPIP
- c) Merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- d) Melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal secara terencana dan terstruktur.
- e) Melakukan pemetaan risiko korupsi pada rencana tindak pengendalian untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan upaya antara lain dengan cara mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut ke Kabupaten/Kota dan perangkat daerah melalui APIP dalam penugasan untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya, dengan status dalam proses tindak lanjut dan belum ditindaklanjuti. Hal tersebut antara lain disebabkan terdapat rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut lama, temuan sulit ditindaklanjuti, dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang baru terbit.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada tahun 2022 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan dua kali pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu pada bulan Juni dan Desember 2022. Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s.d. tahun 2022 sebanyak 58 LHP dengan jumlah temuan sebanyak 769 temuan dan 1.826 rekomendasi. Rekapitulasi status tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI semester 1 tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Status Tindak Lanjut BPK RI Tahun 2005 s.d. 2022

Tahun IHPS	Temuan	Rekom	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jumlah	Jumlah
2005	30	44	44	-	-	-
2006	32	48	48	-	-	-
2007	23	47	47	-	-	-
2008	71	136	97	-	-	39
2009	24	48	37	11	-	-
2010	52	93	90	3	-	-
2011	45	131	129	2	-	-
2012	44	91	82	9	-	-
2013	66	142	142	-	-	-
2014	70	156	144	12	-	-
2015	52	160	143	17	-	-
2016	55	161	143	18	-	-
2017	32	71	51	20	-	-
2018	43	107	95	12	-	-
2019	35	82	58	24	-	-
2020	56	196	156	40	-	-
2021	29	84	64	20	-	-
2022	10	29	4	24	1	-
Jumlah	769	1.826	1.574	212	1	39

**Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1*

Pada Semester 1 Tahun 2022 terdapat 1 Laporan yang belum ditindak lanjuti yaitu tentang Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan atas Unit Usaha Mandiri di Sekolah, namun pada Semester 2 Tahun 2022 Temuan ini sudah ditindaklanjuti dan sampai saat ini bulan Januari 2023 masih menunggu hasil dari BPK untuk mendapatkan status selesai dari temuan tersebut.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Dalam pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggunakan Sistem Pengawasan Online dengan nama SIMWAS Online dan pada akhir Tahun 2022 Tercatat pada Sistem tersebut sebanyak 1376 Temuan dan 1871 Rekomendasi yang sudah dihasilkan dari Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Rekomendasi pada Tahun 2022. Dan untuk rekomendasi yang diselesaikan secara langsung pada tahun 2022 juga yaitu adalah sebanyak 970

rekomendasi. Rincian dari banyaknya temuan dan rekomendasi tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumlah Temuan)

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Temuan Selesai Tidak Lanjut	Rekom yang Selesai TL	% Selesai	Temuan Dalam Proses TL	Rekom Dalam Proses TL	% Dalam Proses
2014	1.818	2.523	1.797	2.467	97,78%	21	56	2,22%
2015	2.260	3.100	2.248	3.080	99,35%	12	20	0,65%
2016	2.115	2.862	2.082	2.815	98,36%	33	47	1,64%
2017	1.168	1.789	1.160	1.769	98,88%	8	20	1,12%
2018	1.641	2.371	1.628	2.351	99,16%	13	20	0,84%
2019	1.529	2.057	1.517	2.036	98,98%	12	21	1,02%
2020	775	1.020	762	1.002	98,24%	13	18	1,76%
2021	884	1.404	827	1.311	93,38%	57	93	6,62%
2022	1.376	1.871	695	970	51,84%	681	901	48,16%
Grand Total	13.566	18.997	12.716	17.801	93,70%	850	1.196	6,30%

Tabel 3.3. Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumlah Nilai)

Tahun	Nilai Total Temuan Pemeriksaan	Nilai Total Rekom	Nilai Rekom yang Selesai TL	% Selesai	Nilai Rekom Dalam Proses TL	% Dalam Proses
2014	3.316.675.110,62	3.316.675.110,62	3.012.797.841,03	90,84%	303.877.269,59	9,16%
2015	5.913.404.678,10	5.913.404.678,10	4.488.559.214,71	75,90%	1.424.845.463,39	24,10%
2016	13.647.828.386,06	13.647.828.386,06	13.509.617.369,55	98,99%	138.211.016,51	1,01%
2017	1.594.602.531,09	1.594.602.531,09	1.583.737.349,64	99,32%	10.865.181,45	0,68%
2018	2.049.627.784,04	2.049.627.784,04	1.901.409.147,40	92,77%	148.218.636,64	7,23%
2019	4.322.690.131,30	4.322.690.131,30	4.272.684.722,63	98,84%	50.005.408,67	1,16%
2020	1.504.235.041,96	1.504.235.041,96	1.184.639.871,96	78,75%	319.595.170,00	21,25%
2021	1.627.934.672,04	1.627.934.672,04	1.411.550.172,04	86,71%	216.384.500,00	13,29%
2022	2.934.084.076,12	2.934.084.076,12	1.277.923.430,23	43,55%	1.656.160.645,89	56,45%
Grand Total	36.911.082.411,33	36.911.082.411,33	32.642.919.119,19	88,44%	4.268.163.292,14	11,56%

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri pada bulan April 2021 telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai 10 Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019. Prestasi ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam

memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada Tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengawal kegiatan pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri pada bulan November. Pemeriksaan tersebut tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan nomor 700.1.2.1/272/IJ. Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa Temuan Administrasi sebanyak 9 Temuan dengan 14 Rekomendasi dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.4., sedangkan untuk Temuan dengan Nilai untuk Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

Tabel 3.4. Status Tindak Lanjut Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

NO	ASPEK PENGAWASAN	TEMUAN	REKOM	STATUS TLHP				
				ADMINISTRASI				
				S	BS	BD	TPTD	TOTAL
1	Aspek Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	1	1	0	1	0	0	1
2	Aspek Keuangan Daerah	4	9	5	4	0	0	9
3	Aspek Pembangunan Daerah	1	1	1	0	0	0	1
4	Aspek Pelayanan Publik Di Daerah	1	1	1	0	0	0	1
5	Urusan Ketentraman Dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	1
6	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	1	0	0	0	1
TOTAL		9	14	8	6	0	0	14

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi aduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, limbah atau yang diterima dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah. Sepanjang tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 78 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 33, Lapor Gub sebanyak 12, media sosial sebanyak 9, limbah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sebanyak 2, limbah Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 6, dan limbah Gubernur sebanyak 15. Rincian tercantum dalam Lampiran 4.

Tabel 4.1. Pengaduan Masyarakat berdasarkan sumber aduan yang masuk pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sumber Aduan	Tahun		
	2020	2021	2022
LAPORGUB	137	42	12
LIMPAHAN GUBERNUR	2	4	15
LIMPAHAN IRJEN	7	4	
LIMPAHAN KPK	1		1
LIMPAHAN MENTERI	5	3	2
LIMPAHAN SETNEG	12	3	6
MEDIA SOSIAL	13	13	9
SURAT ADUAN / LANGSUNG	25	28	33
Grand Total	202	97	78

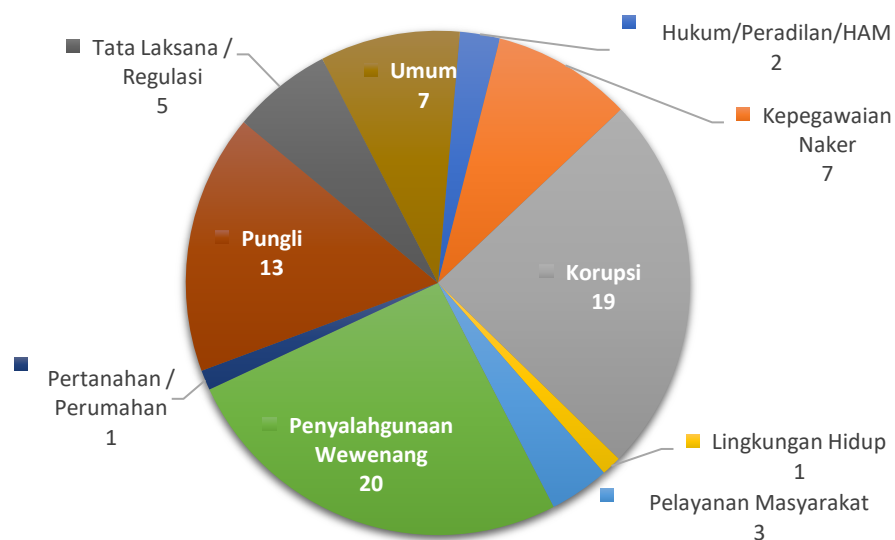
Penanganan aduan masyarakat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu pengaduan dilakukan dengan diperiksa sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 aduan, pengaduan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sebanyak 31 aduan, dilimpahkan ke OPD sebanyak 6 aduan, dan pengaduan kurang cukup data di awal sebanyak

17 aduan. Aduan-aduan yang kurang cukup data diawal disebabkan karena aduan tersebut sudah diperiksa sebelumnya, informasi tidak lengkap, dan data tidak jelas.

Tabel 4.2. Pengaduan Masyarakat berdasarkan penanganannya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sumber Aduan	Tahun		
	2020	2021	2022
Kurang Cukup data Diawal	27	5	17
Dilimpahkan ke Instansi Vertikal INSTANSI: Irwasda Polda Jateng	3	16	3
Dilimpahkan ke Kab/Kota	151	45	31
Dilimpahkan ke SKPD	3	6	6
Diperiksa Inspektorat Provinsi	18	25	21
Grand Total	202	97	78

Gambar 4.1. Pengaduan Masyarakat tahun 2022 berdasarkan klasifikasi jenis aduan



A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemeriksaan aduan masyarakat sebanyak 21 aduan dengan perincian yaitu telah ditindaklanjuti sebanyak 20 aduan dengan hasil 10 aduan terbukti, 7 aduan tidak terbukti, dan 3 aduan berupa jawaban keterangan dan 1 aduan masih dalam proses.

B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melimpahkan aduan masyarakat kepada Kabupaten/Kota sebanyak 31 aduan. Dari 31 aduan tersebut 8 aduan terbukti, 10 aduan dinyatakan tidak terbukti, dan 11 aduan masih dalam proses tindak lanjut. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. di bawah ini:

Tabel 4.3. Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan pada Kabupaten Kota

KOTA	ADUAN DILIMPALKAN	SELESAI			DALAM PROSES
		T	TT	KET	
KABUPATEN BANYUMAS	1				1
KABUPATEN BATANG	1	1			
KABUPATEN BOYOLALI	1				1
KABUPATEN CILACAP	2	1	1		
KABUPATEN DEMAK	2		1		1
KABUPATEN GROBOGAN	2		2		
KABUPATEN JEPARA	1				1
KABUPATEN KEBUMEN	2		1	1	
KABUPATEN KLATEN	1	1			
KABUPATEN KUDUS	1		1		
KABUPATEN MAGELANG	1				1
KABUPATEN PATI	2	2			
KABUPATEN PEKALONGAN	1	1			
KABUPATEN PEMALANG	1				1
KABUPATEN PURWOREJO	1				1
KABUPATEN SEMARANG	1			1	
KABUPATEN SUKOHARJO	2	1			1
KABUPATEN TEGAL	4	3			1
KABUPATEN TEMANGGUNG	1				1
KOTA SALATIGA	1		1		
KOTA SEMARANG	2		1		1
TOTAL	31	10	8	2	11

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
2. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebanyak 1376 temuan yang meliputi temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan sebanyak 461 (33,5%), temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 759 (55,16%) dan temuan 3E sebanyak 156 (11,34%) dan menghasilkan total 1871 rekomendasi. Status tindak lanjut yang dinyatakan selesai sebanyak 970, dalam proses sebanyak 850.
3. Pada Tahun 2022 ini, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 78 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 33 aduan, Laporan Gub sebanyak 12 aduan, media sosial sebanyak 9 aduan, limpahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sebanyak 2 aduan, limpahan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 6 aduan, dan limpahan Gubernur sebanyak 15 aduan.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, APIP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya yaitu:
 - a. Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2022 terdapat 1574 rekomendasi yang telah selesai (86,2%), 212 rekomendasi dalam proses tindak lanjut (11,61%) dan 1 rekomendasi belum ditindaklanjuti (0,05%).
 - b. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 hingga 2022 terdapat 17.801 (93,7%) rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, 850 (6,3%) rekomendasi dalam proses.
5. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 terdapat 187 temuan dengan 267

rekomendasi. Dari status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut sebanyak 261 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

B. HAMBATAN

1. Masih terdapat rekomendasi dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat maupun sulit ditindaklanjuti.
2. Adanya tugas/mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diluar tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Keterbatasan kemampuan SIMWAS Online dalam memberikan Informasi yang dibutuhkan dalam monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan adanya error di beberapa menu atau fitur SIMWAS Online.
4. Objek pemeriksaan baik Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatkan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah.

C. REKOMENDASI

1. Lebih aktif dalam hal pemantauan tindak lanjut sehingga tindak lanjut cepat diproses oleh auditi.
2. Meningkatkan bimbingan teknis pengawasan terutama audit kinerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Melaksanakan consultant activity secara aktif terutama pada temuan- temuan yang sering muncul sehingga tidak menjadi temuan berulang.
4. Melakukan *updating* system SIMWAS Online atau pergantian system menjadi lebih baik.
5. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.



Lampiran 1

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
DAN TINDAK LANJUTNYA HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
TAHUN 2008 S.D. 2022**

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TAHUN IHPS		:	2022											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	7	3.501.040.727,00	17	1.810.780.000,00	2	460.101.429,00	14	1.350.678.571,00	1	0,00	-	0,00	2.150.362.156,00
2	LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	3	0,00	12	0,00	2		10		-		-		
Jumlah		10	3.501.040.727,00	29	1.810.780.000,00	4	460.101.429,00	24	1.350.678.571,00	1	-	-	-	2.150.362.156,00
TAHUN IHPS		:	2021											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	10	455.859.641,49	20	455.859.641,49	7	0,00	13	455.859.641,49	-	0,00	-	0,00	145.164.142,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	4	0,00	22	0,00	22	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	11	0,00	33	0,00	33	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 Di Provinsi Jawa Tengah	4	0,00	9	0,00	2	0,00	7	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah		29	455.859.641,49	84	455.859.641,49	64	0,00	20	455.859.641,49	-	0,00	-	0,00	145.164.142,00

TAHUN IHPS		:	2020											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah	12	0,00	74	0,00	58	0,00	16	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	14	943.002.341,33	54	943.002.341,33	36	943.002.341,33	18	0,00	-	0,00	-	0,00	216.912.104,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	9	1.282.856.291,00	15	0,00	15	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional PT. Sarana Patra Hulu Cepu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 (Semester I)	8	4.543.741.029,00	19	4.404.432.999,00	19	4.404.432.999,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.309.832.999,00
5	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	13	0,00	34	0,00	28	0,00	6	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah		56	6.769.599.661,33	196	5.347.435.340,33	156	5.347.435.340,33	40	0,00	-	0,00	-	0,00	4.526.745.103,00

TAHUN IHPS		:	2019											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	6	0,00	31	0,00	22	0,00	9	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Semarang, Jakarta, Pati, Pekalongan, dan Purwokerto	6	84.206.355.059,00	8	0,00	5	0,00	3	0,00	-	0,00	-	0,00	5.707.289.917,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	23	4.760.376.658,29	43	4.760.376.658,29	31	3.608.260.493,29	12	1.152.116.165,00	-	0,00	-	0,00	2.687.991.957,00
Jumlah		35	88.966.731.717,29	82	4.760.376.658,29	58	3.608.260.493,29	24	1.152.116.165,00	-	0,00	-	0,00	8.395.281.874,00

TAHUN IHPS		:	2018											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	17	0,00	49	0,00	47	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	26	4.352.135.169,97	58	3.942.862.764,97	48	3.699.496.201,64	10	243.366.563,33	-	0,00	-	0,00	4.141.225.361,23
Jumlah		43	4.352.135.169,97	107	3.942.862.764,97	95	3.699.496.201,64	12	243.366.563,33	-	0,00	-	0,00	4.141.225.361,23

TAHUN IHPS		:	2017											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	18	2.397.949.613,20	32	2.397.949.613,20	27	2.397.949.613,20	5	0,00	-	0,00	-	0,00	2.398.043.025,69
2	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017	14	0,00	39	0,00	24	0,00	15	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah		32	2.397.949.613,20	71	2.397.949.613,20	51	2.397.949.613,20	20	0,00	-	0,00	-	0,00	2.398.043.025,69



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

TAHUN IHPS		:	2016											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	28	2.735.813.152,30	73	2.687.813.152,30	67	724.884.052,30	6	1.962.929.100,00	-	0,00	-	0,00	930.687.552,30
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	10	0,00	34	0,00	26	0,00	8	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	11	0,00	44	0,00	44	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
4	Hasil Pemeriksaan BPK atas Kegiatan Operasional dan Investasi PT Sarana Patra Hulu Cepu Tahun Buku 2014 s.d. Semester I 2015	6	0,00	10	0,00	6	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah		55	2.735.813.152,30	161	2.687.813.152,30	143	724.884.052,30	18	1.962.929.100,00	-	0,00	-	0,00	930.687.552,30

TAHUN IHPS		:	2015											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	33	4.135.352.824,74	108	634.554.123,46	93	478.641.222,76	15	155.912.900,70	-	0,00	-	0,00	4.221.651.361,04



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 di Semarang	5	1.984.580.167,03	17	1.984.580.167,03	17	1.984.580.167,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.984.587.659,65
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	6	0,00	14	0,00	12	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2014 di Semarang	8	0,00	21	0,00	21	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah		52	6.119.932.991,77	160	2.619.134.290,49	143	2.463.221.389,79	17	155.912.900,70	-	0,00	-	0,00	6.206.239.020,69

TAHUN IHPS		:	2014											
1	LHP LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2013	21	1.042.532.185,53	62	1.042.532.185,53	58	1.042.532.185,53	4	0,00	-	0,00	-	0,00	1.042.532.185,53
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Juli)	32	179.162.421.902,11	66	132.096.321.048,45	58	84.726.582.838,85	8	47.369.738.209,60	-	0,00	-	0,00	2.444.529.687,85



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Banyumas	17	5.272.720.017,51	28	288.152.868,94	28	288.152.868,94	-	0,00	-	0,00	-	0,00	925.494.897,00
Jumlah		70	185.477.674.105,15	156	133.427.006.102,92	144	86.057.267.893,32	12	47.369.738.209,60	-	0,00	-	0,00	4.412.556.770,38

TAHUN IHPS		:	2013											
1	LHP BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	17	1.032.316.397,00	47	1.014.144.497,00	47	1.014.144.497,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.024.616.397,00
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Provinsi Jawa Tengah dan RSUD Dr Moewardi	11	142.379.513,73	14	142.379.513,73	14	142.379.513,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012	13	524.818.000,00	29	524.818.000,00	29	524.818.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	603.298.006,75



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan Semester I 2013	25	0,00	52	0,00	52		-		-		-		
Jumlah		66	1.699.513.910,73	142	1.681.342.010,73	142	1.681.342.010,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.627.914.403,75

TAHUN IHPS		:	2012												
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	18	15.300.407.190,00	38	10.464.667.860,00	34	4.181.412.813,00	4	6.283.255.047,00	-	0,00	-	0,00	2.057.704.834,00	
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011	18	2.335.147.801,00	40	1.987.891.611,00	36	1.987.891.611,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	2.119.472.611,00	
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	8	0,00	13	0,00	12	0,00	1		-		-		3.505.309.640,00	
Jumlah		44	17.635.554.991,00	91	12.452.559.471,00	82	6.169.304.424,00	9	6.283.255.047,00	-	0,00	-	0,00	7.682.487.085,00	

TAHUN IHPS		:	2011												
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 di Semarang	12	666.521.328,00	26	666.521.328,00	26	666.521.328,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	666.521.328,00	



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Semarang	12	867.431.057,99	29	867.431.057,99	29	867.431.057,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.095.122.353,38
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010	9	128.875.889,00	55	128.875.889,00	53	128.875.889,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	128.875.889,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 di Surakarta	12	0,00	21	0,00	21		-		-		-		
Jumlah		45	1.662.828.274,99	131	1.662.828.274,99	129	1.662.828.274,99	2	0,00	-	0,00	-	0,00	1.890.519.570,38

TAHUN IHPS		:	2010											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 dan 2010	14	488.547.225,00	27	462.877.225,00	26	462.877.225,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	461.947.225,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Tahun Buku 2009 dan 2010	11	6.928.588.309,00	23	6.444.088.309,00	22	1.186.838.323,00	1	5.257.249.986,00	-	0,00	-	0,00	894.253.632,00
3	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2009	11	976.170.781,05	20	976.170.781,05	19	6.380.201,00	1	969.790.580,05	-	0,00	-	0,00	6.380.201,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Hasil Pemeriksaan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan TA 2008 dan 2009 Provinsi Jawa Tengah	11	11.650.000,00	12	11.650.000,00	12	11.650.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	11.650.000,00
5	Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	5	3.491.494.657,46	11	245.732.688,99	11	245.732.688,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.371.412.957,46
Jumlah		52	11.896.450.972,51	93	8.140.519.004,04	90	1.913.478.437,99	3	6.227.040.566,05	-	0,00	-	0,00	2.745.644.015,46
TAHUN IHPS		: 2009												
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	7	947.934.146,22	13	947.934.146,22	5	112.722.419,00	8	835.211.727,22	-	0,00	-	0,00	165.320.515,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2008 di Semarang	17	212.311.104,98	35	212.311.104,98	32	62.083.288,00	3	150.227.816,98	-	0,00	-	0,00	160.340.039,00
Jumlah		24	1.160.245.251,20	48	1.160.245.251,20	37	174.805.707,00	11	985.439.544,20	-	0,00	-	0,00	325.660.554,00
TAHUN IHPS		: 2008												



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Atas Kegiatan Operasional Bank Pembangunan Daerah Jateng Tahun Buku 2006 dan 2007	19	0,00	32	0,00	32		-		-		-		
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007	20	21.385.027.425,48	40	20.710.817.809,00	40	20.710.817.809,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.710.817.809,00
3	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I) pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah	19	78.223.000,00	39	61.330.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	39	61.330.500,00	
4	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	13	1.382.344.934,00	25	1.382.344.934,00	25	1.382.344.934,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.382.344.934,00
Jumlah		71	22.845.595.359,48	136	22.154.493.243,00	97	22.093.162.743,00	-	0,00	-	0,00	39	61.330.500,00	22.093.162.743,00

TAHUN IHPS		:	2007											
1	LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2006	20	17.707.186,14	43	17.707.186,14	43	17.707.186,14	-	0,00	-	0,00	-	0,00	17.707.186,14
2	Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 dan Smt I 2007	3	0,00	4	0,00	4		-		-		-		

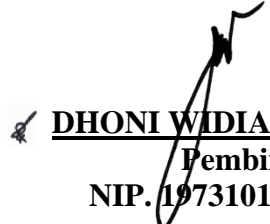


No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah		23	17.707.186,14	47	17.707.186,14	47	17.707.186,14	-	0,00	-	0,00	-	0,00	17.707.186,14

TAHUN IHPS		:	2006											
1	Laporan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 di Semarang	19	2.929.728.157,00	28	2.475.133.157,00	28	2.475.133.157,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.936.147.157,00
2	Hasil Pemeriksaan atas (Audit Tujuan Tertentu) pada Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Tahun Buku 2005 dan 2006 di Semarang	13	1.328.890.115,78	20	1.328.890.115,78	20	1.328.890.115,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00	964.390.115,78
Jumlah		32	4.258.618.272,78	48	3.804.023.272,78	48	3.804.023.272,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.900.537.272,78
TAHUN IHPS		:	2005											
1	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004	6	87.006.179,00	7	87.006.179,00	7	87.006.179,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	87.006.179,00
2	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Propinsi Jawa Tengah di Semarang	8	5.771.394.781,61	12	5.771.394.781,61	12	5.771.394.781,61	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.771.394.781,61
3	Hasil Pemeriksaan atas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Buku 2004 dan 2005 di Semarang	16	26.359.993,92	25	26.359.993,92	25	26.359.993,92	-	0,00	-	0,00	-	0,00	26.359.993,92
Jumlah		30	5.884.760.954,53	44	5.884.760.954,53	44	5.884.760.954,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.884.760.954,53



Semarang, 27 Februari 2023
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya


DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19731015 199703 1 002



Lampiran 2

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT
DAN TINDAK LANJUTNYA HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 S.D. 2022**

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2022										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	461	698	2.934.084.076,12	249	401	1.240.877.330,23	212	297	1.693.206.745,89
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	759	953	0	355	437	0	404	516	0,00
3	Temuan 3E	156	220	0	91	132	0	65	88	0,00
	TOTAL	1.376	1.871	2.934.084.076,12	695	970	1.240.877.330,23	681	901	1.693.206.745,89
B. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2021										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	385	611	1.627.934.672,04	366	576	1.410.760.647,04	19	35	217.174.025,00
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	422	674	0	388	623	0	34	51	0,00
3	Temuan 3E	77	119	0	75	116	0	2	3	0,00
	TOTAL	884	1.404	1.627.934.672,04	829	1.315	1.410.760.647,04	55	89	217.174.025,00



No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2020										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	311	441	1.504.235.041,96	304	431	1.184.639.871,96	7	10	319.595.170,00
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	389	465	0	383	457	0	6	8	0,00
3	Temuan 3E	75	114	0	75	114	0	0	0	0,00
	TOTAL	775	1.020	1.504.235.041,96	762	1.002	1.184.639.871,96	13	18	319.595.170,00
D. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2019										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	809	1.056	4.322.690.131,30	800	1.038	4.272.684.722,63	9	18	50.005.408,67
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	528	771	0	527	770	0	1	1	0,00
3	Temuan 3E	192	230	0	190	228	0	2	2	0,00
	TOTAL	1.529	2.057	4.322.690.131,30	1.517	2.036	4.272.684.722,63	12	21	50.005.408,67
E. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2018										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	865	1.368	2.049.627.784,04	854	1.350	1.901.409.147,40	11	18	148.218.636,64
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	552	708	0	550	706	0	2	2	0,00
3	Temuan 3E	224	295	0	224	295	0	0	0	0,00



No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL	1.641	2.371	2.049.627.784,04	1.628	2.351	1.901.409.147,40	13	20	148.218.636,64
F. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2017										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	707	1.142	1.594.602.531,09	703	1.132	1.583.737.349,64	4	10	10.865.181,45
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	294	425	0	290	415	0	4	10	0,00
3	Temuan 3E	167	222	0	167	222	0	0	0	0,00
	TOTAL	1.168	1.789	1.594.602.531,09	1.160	1.769	1.583.737.349,64	8	20	10.865.181,45
G. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2016										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.241	1.720	13.641.333.386,06	1.221	1.692	13.497.984.912,62	20	28	143.348.473,44
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	564	718	6.495.000,00	555	705	6.495.000,00	9	13	0,00
3	Temuan 3E	310	424	0	306	418	0	4	6	0,00
	TOTAL	2.115	2.862	13.647.828.386,06	2.082	2.815	13.504.479.912,62	33	47	143.348.473,44
H. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2015										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.212	1.768	5.913.404.678,10	1.201	1.751	4.464.227.724,71	11	17	1.449.176.953,39



No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	677	847	0	676	844	0	1	3	0,00
3	Temuan 3E	371	485	0	371	485	0	0	0	0,00
	TOTAL	2.260	3.100	5.913.404.678,10	2.248	3.080	4.464.227.724,71	12	20	1.449.176.953,39
H. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2014										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	930	1.373	3.316.675.110,62	910	1.318	2.699.030.677,94	20	55	617.644.432,68
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	475	608	0	474	607	0	1	1	0,00
3	Temuan 3E	413	542	0	413	542	0	0	0	0,00
	TOTAL	1.818	2.523	3.316.675.110,62	1.797	2.467	2.699.030.677,94	21	56	617.644.432,68

Semarang, 27 Februari 2023
 Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
 Auditor Ahli Madya


DHONI WIDIANTO, S.Sos..M.Si
 Rembina Tk. 1
 NIP. 19731015 199703 1 002



Lampiran 3

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT
DAN TINDAK LANJUTNYA HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT
ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 S.D. 2022**

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET**
		Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	HP TAHUN 2022													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	9	14	0	4	8	0	5	6	0	0	0	0	
	Sub Jumlah A	9	14	0	4	8	0	5	6	0	0	0	0	
B	HP TAHUN 2021													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah A	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
C	HP TAHUN 2020													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah B	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
D	HP TAHUN 2019													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	13	25	0	13	25	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah C	13	25	0	13	25	0	0	0	0	0	0	0	
D	HP TAHUN 2018													




No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET**
		Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tidak													
	Mencantumkan Kode temuan	16	34	0	16	34	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah D	16	34	0	16	34	0	0	0	0	0	0	0	
E	HP TAHUN 2017													
	Mencantumkan Kode temuan	20	29	0	20	29	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah E	20	29	0	20	29	0	0	0	0	0	0	0	
F	HP TAHUN 2016													
	Tidak mencantumkan kode temuan	15	20	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah F	15	20	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	
G	HP TAHUN 2015													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	28	0	20	28	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah G	20	28	0	20	28	0	0	0	0	0	0	0	
H	HP TAHUN 2014													
	Tidak mencantumkan kode temuan	21	31	0	21	31	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah H	21	31	0	21	31	0	0	0	0	0	0	0	
I	HP TAHUN 2013													



No	HP SEMESTERAN Kelompok/ Kode Temuan	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET**
		Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	21	0	20	21	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah I	20	21	0	20	21	0	0	0	0	0	0	0	
J	HP Tahun 2012													
	Tidak mencantumkan kode temuan	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah J	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0	0	0	0	
K	HP Tahun 2011													
	Tidak mencantumkan kode temuan	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah K	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Total A-K	187	267	259.081.000,00	182	261	259.081.000,00	5	6	-	-	-	-	

Semarang, 27 Februari 2023
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya


DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19731015 199703 1 002



Lampiran 4

REKAPITULASI HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2022

No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
1	2022	21-Jan-22	11-Feb-22	-	07-Jan-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Dilimpahkan ke SKPD SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROSES	
2	2022	21-Jan-22	12-Jan-22	-	12-Jan-22	MEDIA SOSIAL	pungli	Pungli	Dilimpahkan ke Instansi Vertikal INSTANSI: Irwasda Polda Jateng	PROSES	
3	2022	30-Mar-22	30-Mar-22	-	27-Jan-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	permohonan pemantauan, tindak lanjut dan pengusutan	Tata Laksana/Regulasi	Diarsip		
4	2022	30-Mar-22	08-Feb-22	-	02-Feb-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	proses perijinan IMB yang dipersulit	Pelayanan Masyarakat	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
5	2022	30-Mar-22	30-Mar-22	-	03-Feb-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	permohonan audit	Penyalahgunaan Wewenang	Diarsip		
6	2022	04-Apr-22	03-Feb-22	-	03-Feb-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN SUKOHARJO	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
7	2022	04-Apr-22	09-Feb-22	-	09-Feb-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN GROBOGAN	TERBUKTI	SELESAI
8	2022	04-Apr-22	09-Feb-22	-	09-Feb-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN GROBOGAN	TERBUKTI	SELESAI



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
9	2022	04-Apr-22	04-Feb-22	-	04-Feb-22	MEDIA SOSIAL	penimbunan beras	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN CILACAP	TDK_TERBUKTI	SELESAI
10	2022	05-Apr-22	18-Feb-22	B-42/D-2/Dumas/DM.09/01/2022	26-Jan-22	LIMPAHAN SETNEG	pengaduan masyarakat	Umum	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN KEBUMEN	KETERANGAN	SELESAI
11	2022	05-Apr-22	15-Mar-22	-	10-Mar-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	perangkat desa melakukan poliandri	Kepegawaian Naker	Diarsip		
12	2022	05-Apr-22	23-Mar-22	R-107/M.3.3/Dek.1/03/2022	15-Mar-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	permohonan movev	Umum	Diperiksa Inspektorat Provinsi	KETERANGAN	SELESAI
13	2022	05-Apr-22	23-Mar-22	R-107/M.3.3/Dek.1/03/2022	15-Mar-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	penyalahgunaan wewenang	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	KETERANGAN	SELESAI
14	2022	05-Apr-22	15-Mar-22	-	07-Mar-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	STTB palsu	Kepegawaian Naker	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUKTI	SELESAI
15	2022	07-Apr-22	10-Jan-22	01/MSAJI/2022	06-Jan-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan pelayanan pekerjaan	Hukum/Peradilan/HAM	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
16	2022	27-Apr-22	25-Apr-22	-	25-Apr-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN PATI	TDK_TERBUKTI	SELESAI
17	2022	23-Mei-22	16-Mei-22	-	16-Mei-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN JEPARA	PROSES	



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
18	2022	06-Jun-22	18-Apr-22	2775/G6/RHT/W.S.03.00/2022	01-Apr-22	LIMPAHAN MENTERI	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
19	2022	06-Jun-22	10-Mei-22	HM.08.01/S-773/PW11/5.2/2022	26-Apr-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
20	2022	06-Jun-22	31-Mei-22	-	26-Apr-22	LIMPAHAN GUBERNUR	informasi pembangunan tanggul	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
21	2022	30-Jun-22	20-Jul-22	-	15-Jul-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke SKPD SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
22	2022	30-Jun-22	27-Jun-22	-	02-Jun-22	LIMPAHAN SETNEG	pengaduan masyarakat	Pertanahan/Perumahan	Diarsip		
23	2022	30-Jun-22	27-Jun-22	-	13-Jun-22	LIMPAHAN GUBERNUR	dugaan tipikor	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN TEGAL	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
24	2022	30-Jun-22	22-Jun-22	-	20-Jun-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Kepegawaian Naker	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
25	2022	30-Jun-22	30-Jun-22	-	13-Apr-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
26	2022	05-Jul-22	10-Jun-22	-	10-Jun-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN CILACAP	TERBUKTI	SELESAI
27	2022	18-Jul-22	11-Jul-22	B-40/D-2/Dumas/DM.09/06/2022	21-Jun-22	LIMPAHAN SETNEG	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Diarsip		



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
28	2022	21-Jul-22	27-Jun-22	--	27-Jun-22	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN BATANG	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
29	2022	25-Jul-22	22-Jul-22	R/4006/PM.00.00/30-35/07/2022	18-Jul-22	LIMPAHAN KPK	dugaan penyimpangan pencairan data covid	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
30	2022	25-Jul-22	07-Jul-22	-	07-Jul-22	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN TEGAL	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
31	2022	01-Agu-22	27-Jul-22	-	18-Jul-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Lingkungan Hidup	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN SEMARANG	KETERANGAN	SELESAI
32	2022	15-Agu-22	18-Jul-22	-	18-Jul-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KOTA SALATIGA	TERBUKTI	SELESAI
33	2022	15-Agu-22	08-Agu-22	-	08-Agu-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN PATI	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
34	2022	15-Agu-22	09-Agu-22	-	09-Agu-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN DEMAK	TERBUKTI	SELESAI
35	2022	15-Agu-22	26-Jul-22	-	26-Jul-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN KLATEN	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
36	2022	16-Agu-22	30-Jun-22	700/2127/03/2022	30-Jun-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
37	2022	16-Agu-22	12-Agu-22	-	12-Agu-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Kepegawaian Naker	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN SUKOHARJO	PROSES	



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
38	2022	16-Agu-22	13-Jun-22	-	07-Jun-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
39	2022	22-Agu-22	22-Agu-22	-	29-Jul-22	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Pungli	Diarsip		
40	2022	22-Agu-22	15-Agu-22	-	15-Agu-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KOTA SEMARANG	TERBUKTI	SELESAI
41	2022	22-Agu-22	04-Agu-22	-	31-Agu-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	penetapan ahli waris	Umum	Diarsip		
42	2022	25-Agu-22	25-Agu-22	-	01-Agu-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Kepegawaian Naker	Diarsip		
43	2022	26-Agu-22	18-Agu-22	-	18-Agu-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke SKPD SKPD DINAS PERHUBUNGAN	PROSES	
44	2022	26-Agu-22	10-Agu-22	-	03-Agu-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN TEGAL	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
45	2022	29-Agu-22	26-Agu-22	B-35/D-2/Dumas/DM.00/08/2022	16-Agu-22	LIMPAHAN SETNEG	pengaduan masyarakat	Umum	Diarsip		
46	2022	29-Agu-22	11-Mei-22	-	03-Apr-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diarsip		
47	2022	29-Agu-22	06-Apr-22	143/1420/BPD	16-Mar-22	LIMPAHAN MENTERI	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diarsip		



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
48	2022	01-Sep-22	12-Agu-22	-	25-Jul-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN TEGAL	PROSES	
49	2022	01-Sep-22	12-Agu-22	-	02-Agu-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN TEMANGGUNG	PROSES	
50	2022	08-Sep-22	08-Sep-22	-	10-Agu-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diarsip		
51	2022	22-Sep-22	17-Sep-22	-	17-Sep-22	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN BANYUMAS	PROSES	
52	2022	26-Sep-22	26-Sep-22	-	22-Agu-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Kepegawaian Naker	Diarsip		
53	2022	03-Okt-22	12-Sep-22	-	15-Sep-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diarsip		
54	2022	05-Okt-22	27-Jun-22	-	27-Jun-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke SKPD SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TDK_TERBUKT I	SELESAI
55	2022	05-Okt-22	23-Sep-22	-	23-Sep-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke SKPD SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TDK_TERBUKT I	SELESAI
56	2022	13-Okt-22	26-Sep-22	-	26-Sep-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN DEMAK	PROSES	



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
57	2022	26-Okt-22	14-Okt-22	-	14-Okt-22	LAPORGUB	dugaan pungli	Pungli	Dilimpahkan ke Instansi Vertikal INSTANSI: Irwasda Polda Jateng	PROSES	
58	2022	26-Okt-22	16-Okt-22	-	16-Okt-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke Instansi Vertikal INSTANSI: Irwasda Polda Jateng	PROSES	
59	2022	26-Okt-22	24-Okt-22	-	15-Okt-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN KUDUS	TERBUKTI	SELESAI
60	2022	26-Okt-22	12-Okt-22	-	15-Sep-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diarsip		
61	2022	26-Okt-22	03-Okt-22	-	03-Okt-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN KEBUMEN	TERBUKTI	SELESAI
62	2022	26-Okt-22	05-Okt-22	-	10-Agu-22	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Umum	Dilimpahkan ke SKPD SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROSES	
63	2022	10-Nov-22	07-Nov-22	B-35/D-2/Dumas/DM.02/09/2022	20-Sep-22	LIMPAHAN SETNEG	permohonan bantuan	Umum	Diarsip		
64	2022	10-Nov-22	01-Nov-22	-	01-Nov-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KOTA SEMARANG	PROSES	
65	2022	21-Nov-22	14-Nov-22	B-39/D-2/Dumas/DM.04/10/2022	29-Okt-22	LIMPAHAN SETNEG	pengaduan masyarakat	Umum	Diarsip		
66	2022	25-Nov-22	20-Sep-22	-	20-Sep-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUKTI I	SELESAI



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
67	2022	25-Nov-22	20-Sep-22	-	20-Sep-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUKTI I	SELESAI
68	2022	25-Nov-22	14-Sep-22	-	14-Sep-22	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Pungli	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
69	2022	14-Des-22	06-Des-22	-	04-Nov-22	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Pelayanan Masyarakat	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN PEMALANG	PROSES	
70	2022	14-Des-22	02-Des-22	-	16-Nov-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN PURWOREJO	PROSES	
71	2022	14-Des-22	02-Des-22	-	16-Nov-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Kepegawaian Naker	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN MAGELANG	PROSES	
72	2022	26-Des-22	11-Mei-22	-	03-Apr-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
73	2022	26-Des-22	15-Okt-22	-	15-Okt-22	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	KETERANGAN	SELESAI
74	2022	27-Des-22	15-Sep-22	R/103/IX/RES.3.3/2022	09-Sep-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
75	2022	02-Jan-23	22-Des-22	-	30-Sep-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN BOYOLALI	PROSES	
76	2022	05-Jan-23	21-Nov-22	-	21-Nov-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
77	2022	05-Jan-23	02-Nov-22	-	02-Nov-22	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Pelayanan Masyarakat	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN PEKALONGAN	TDK_TERBUKTI I	SELESAI






No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
78	2022	10-Jan-23	22-Des-22	-	21-Nov-22	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Hukum/Peradilan/HAM	Diperiksa Inspektorat Provinsi	PROSES	

Semarang, 27 Februari 2023
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya


DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19731015 199703 1 002

 024 3517283-3517284-3556230
 inspektorat@jatengprov.go.id
 @inspektorat_jtg

 @inspektorat prov jateng
 @inspektorat_jtg
 @inspektorat_jtg